

## REINTERPRETASI KONSEP *QAULAN SADIDAN* SEBAGAI *COUNTER-NARRATIVE* TERHADAP HOAKS DI ERA *POST-TRUTH*

Addin Kholisin<sup>1</sup>, Faridatus Sa'adah<sup>2</sup> Muhammad Nasril Ulul Albab<sup>3</sup>

<sup>1</sup> STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang, East Java, Indonesia

<sup>2</sup> Malang Islamic University, East Java, Indonesia

<sup>3</sup> Vice Chairman of Special Branch of Nahdlatul Ulama Japan, Japan

### ABSTRAK

#### Article:

Accepted: 11 June 2026

Revised: 10 May 2026

Issued: 30 June 2026

© 2026 The Author(s).

Published by STKQ Al-Hikam Depok in *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*.



This open-access article is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

DOI: [10.59622/jiat.v7i1.215](https://doi.org/10.59622/jiat.v7i1.215)

Correspondence Address  
[kholisinaddingmail.com](mailto:kholisinaddingmail.com)

Fenomena *post-truth* telah mengubah lanskap komunikasi kontemporer dengan menempatkan emosi dan keyakinan personal sebagai determinan utama pembentukan opini publik, menggeser posisi fakta objektif yang selama ini menjadi fondasi rasionalitas sosial. Kondisi ini menciptakan ruang subur bagi *proliferasi* hoaks yang tidak hanya menyebarkan kebohongan, tetapi secara sistematis mengikis kohesi sosial dan kepercayaan terhadap institusi-institusi demokratis. Artikel ini mengajukan reinterpretasi atas konsep *Qaulan Sadidan* dalam tradisi Al-Qur'an sebagai kerangka etis sekaligus strategis untuk merespons tantangan tersebut melalui pendekatan *counter-narrative*. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) atas ayat-ayat *Qaulan Sadidan* (QS. An-Nisa' [4]: 9 dan QS. Al-Ahzab [33]: 70-71) dengan analisis wacana kritis untuk menjembatani teks suci dan konteks sosial era *post-truth*. Temuan penelitian mengungkap bahwa reinterpretasi *Qaulan Sadidan* menghasilkan tiga pilar fundamental: validitas epistemik (*haq*) yang mewajibkan verifikasi atas setiap informasi, integritas komunikator (*sidq*) yang menekankan keselarasan antara ucapan dan niat, serta orientasi konstruktif (*ishlah*) yang mengarahkan komunikasi pada tujuan-tujuan perbaikan sosial. Ketiga pilar ini secara sinergis membongkar mekanisme disinformasi yang bertumpu pada *hypertruth*, bias konfirmasi, dan disorientasi nilai. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan teori etika komunikasi Islam melalui model integratif *Haq-Sidq-Ishlah* sekaligus menyediakan landasan konseptual bagi pengembangan program literasi digital yang berbasis nilai-nilai keislaman secara lebih substansial.

**Kata Kunci:** *Etika Komunikasi Islam; Qaulan Sadidan; Post-Truth; Counter-Narrative; Media Sosial*

## PENDAHULUAN

Transformasi fundamental dalam lanskap komunikasi publik terjadi seiring menguatnya fenomena *post-truth*, sebuah kondisi di mana fakta objektif kehilangan daya otoritasnya sementara emosi personal menjelma menjadi faktor penentu utama dalam membentuk opini masyarakat. McIntyre (2018) memaknai fenomena ini sebagai bentuk supremasi ideologis dan resep dominasi politik, di mana perasaan subjektif kerap mengalahkan fakta objektif dalam menentukan kebenaran yang diterima publik. Oxford English Dictionary mencatat lonjakan penggunaan istilah ini hingga dua ribu persen pada tahun 2016, bertepatan dengan momentum referendum Brexit dan kontestasi politik di Amerika Serikat (CBC, 2018). (Oxford English Dictionary's 2016 Word of the Year: Post-Truth, 2016) Dalam lanskap *post-truth*, hoaks berfungsi sebagai instrumen utama yang tidak hanya menyebarkan kebohongan, tetapi juga secara sistematis mengeksploitasi sisi emosional publik untuk kepentingan politik dan ideologis. Akibatnya, polarisasi sosial semakin menguat, kohesi masyarakat terkikis, dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi, media, bahkan sains mengalami erosi yang mengkhawatirkan (Potts, 2026).

Merespons fenomena ini menjadi semakin mendesak mengingat disinformasi telah bertransformasi menjadi ancaman eksistensial bagi kelangsungan peradaban manusia. Di Indonesia, fenomena *viral-based policy* yang diangkat oleh Media Indonesia (2025) menunjukkan bagaimana opini publik yang terbentuk di media sosial mampu memaksa institusi negara membatalkan kebijakan hanya dalam hitungan hari. Hal ini mengindikasikan betapa kuatnya pengaruh narasi viral—yang belum tentu terverifikasi kebenarannya—dalam menentukan arah kebijakan publik. Palomo (2025) menjelaskan bahwa efektivitas disinformasi terletak pada kemampuannya untuk terhubung dengan indeks kepercayaan dan filter realitas yang telah dimiliki seseorang sebelumnya, bukan semata-mata karena konten informasi itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan normatif yang hanya mengandalkan seruan etis tanpa memahami mekanisme psikologis yang bekerja tidak akan memadai. Diperlukan reinterpretasi etika komunikasi yang kontekstual dan mampu berfungsi sebagai *counter-narrative* yang membongkar fondasi epistemik di balik keberhasilan hoaks.

Kajian literatur yang berkembang menunjukkan dua kecenderungan utama yang berjalan paralel namun belum terintegrasi secara dialogis. (Fauzi et al., 2025) Di satu sisi, studi tentang etika komunikasi Al-Qur'an telah mengkaji konsep *Qaulan Sadidan*—yang secara harfiah bermakna perkataan yang benar, jujur, dan lurus—dalam berbagai konteks, termasuk respons terhadap hoaks dan ujaran kebencian. Abdullah (2024), misalnya, meneliti persepsi dan respons mahasiswa terhadap berita hoaks berdasarkan tinjauan *Qaulan Sadidan* dan *Qaulan Balighan*. Fauzi, Nurhasan, dan Zahrani (2025) dalam kajiannya tentang etika komunikasi Islam di era *post-truth* menemukan bahwa prinsip *qaulan sadidan* (perkataan yang benar), *tabayyun* (verifikasi), dan amanah (amanah) menawarkan wacana tandingan yang kokoh dan berlandaskan spiritual terhadap budaya *post-truth*. Sementara itu, Asfar, Prayoga, dan Hidayatullah (2024) merumuskan tiga langkah etis untuk komunikasi Islam di ruang digital—verifikasi, formulasi, dan diseminasi—yang mana *qaulan sadidan* menekankan ketepatan dan kejujuran kata. Studi-studi semacam ini cenderung berada pada tataran normatif-tekstualis, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan mekanisme psikologis dan sosiologis yang bekerja di era *post-truth*. Di sisi lain, studi

tentang *post-truth* dan disinformasi dari perspektif Barat banyak dikaji melalui lensa psikologi kognitif, analisis wacana, dan teori komunikasi politik. Palomo (2025) memperkenalkan konsep *hypertruth* sebagai alat teoretis untuk menganalisis bagaimana disinformasi mampu mengubah persepsi seseorang terhadap realitas dengan mengeksploitasi keyakinan yang sudah tertanam sebelumnya. Ada juga penelitian Chan dkk (2025) berjudul "*Cognitive Drivers of Misinformation Belief and Sharing on Social Media: A Cross-National Comparison*" yang mengkaji bagaimana faktor-faktor kognitif seperti pemikiran analitis (*analytical thinking*), literasi berita (*news literacy*), dan pemikiran konspirasi (*conspiracy thinking*) memengaruhi kemampuan seseorang dalam membedakan informasi benar dan salah di media sosial. Melalui studi lintas negara, penelitian ini menemukan bahwa literasi berita secara konsisten meningkatkan kemampuan membedakan berita, sementara pemikiran konspirasi meningkatkan persepsi kebenaran terhadap berita palsu. Kedua korpus literatur ini—etika komunikasi Islam dan teori disinformasi kontemporer—jarang dipertemukan dalam sebuah kerangka analitis yang menguji bagaimana nilai-nilai Qur'ani dapat merespons secara spesifik tantangan epistemik era *post-truth*.

Celah utama yang teridentifikasi dari pemetaan literatur di atas adalah absennya studi yang secara sistemik mereinterpretasi konsep *Qaulan Sadidan* sebagai *counter-narrative* strategis yang mampu menawarkan kerangka epistemik alternatif di tengah banjir disinformasi. Literatur tentang etika komunikasi Islam belum secara memadai menjelaskan bagaimana konsep ini dapat dioperasionalkan untuk merespons mekanisme *hypertruth*, di mana seseorang cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan pralahirnya, terlepas dari validitas faktualnya. McIntyre (2018) menegaskan bahwa ketika seseorang sangat menginginkan untuk mempercayai sesuatu, terdapat kekuatan kognitif yang luar biasa—bias kognitif—yang akan membantunya untuk percaya, bahkan terhadap hal yang terbukti tidak benar. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menawarkan reinterpretasi *Qaulan Sadidan* tidak hanya sebagai etika normatif individual, tetapi sebagai kerangka *counter-narrative* yang mengintegrasikan dimensi epistemik (validitas informasi), dimensi etis (integritas komunikator), dan dimensi teleologis (orientasi perbaikan sosial) untuk secara simultan menepis mekanisme psikologis yang membuat hoaks begitu efektif di era *post-truth*.

Berdasarkan identifikasi gap dan *novelty* di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis secara mendalam makna *qaulan sadidan* dalam khazanah tafsir klasik dan kontemporer untuk mengekstraksi prinsip-prinsip fundamentalnya. Kedua, memetakan karakteristik era *post-truth* dan mekanisme psikologis-sosiologis yang memfasilitasi proliferasi hoaks, termasuk konsep *hypertruth*, indeks kepercayaan, dan filter realitas yang memungkinkan disinformasi diterima sebagai kebenaran. Ketiga, merumuskan reinterpretasi *qaulan sadidan* sebagai *counter-narrative* hoaks dengan membangun model integratif yang mampu merespons tantangan epistemik era *post-truth*. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah pengayaan terhadap diskursus etika komunikasi Islam melalui model yang kontekstual dan responsif terhadap problem kontemporer. Adapun kontribusi praktisnya adalah menyediakan kerangka konseptual bagi pengembangan program literasi digital berbasis nilai-nilai keislaman yang lebih substansial, yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis memverifikasi informasi, tetapi juga membangun kesadaran epistemik dan etis dalam berkomunikasi di ruang publik digital.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai data utama untuk menjawab permasalahan yang dikaji (Mustaqim, 2019). Desain penelitian yang diterapkan adalah studi tafsir tematik (*maudhu'i*) yang dipadukan dengan analisis wacana kritis model Norman Fairclough (Fairclough, 2013). Metode tafsir *maudhu'i* dipilih karena kemampuannya untuk menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang setema, menganalisis korelasi antarayat, serta menyajikan penafsiran yang komprehensif dan kontekstual terhadap suatu konsep—dalam hal ini *Qaulan Sadidan*. Sementara itu, analisis wacana kritis Fairclough dengan model tiga dimensinya—analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural—digunakan untuk menghubungkan teks ayat dengan konteks sosial era

Secara dialektis, pendekatan ini memandang bahasa sebagai praktik sosial yang tidak netral dan memiliki kekuatan dalam membentuk realitas sosial (Fairclough, 2013). Integrasi kedua metode ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya memahami makna tekstual *Qaulan Sadidan*, tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut dapat difungsikan secara strategis dalam merespons dinamika disinformasi kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit memuat frasa *Qaulan Sadidan*, yakni QS. An-Nisa' [4]: 9 dan QS. Al-Ahzab [33]: 70-71, beserta terjemahannya yang merujuk pada publikasi resmi Kementerian Agama RI. Selain itu, kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsir *Jami'ul Bayan* karya Ath-Thabari (2001) dan Tafsir *Al-Qur'an Al-'Adzim* karya Ibnu Katsir (1999), serta kitab tafsir kontemporer seperti Tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab (2000) dan Tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili (2009), digunakan untuk menganalisis perkembangan penafsiran *Qaulan Sadidan* dari masa ke masa. Adapun sumber data sekunder adalah artikel-artikel jurnal internasional bereputasi tentang *post-truth*, hoaks, disinformasi, dan etika komunikasi digital yang terindeks di Scopus atau *Web of Science*, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelusuri, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian (Mustaqim, 2019). Penelusuran literatur dilaksanakan secara sistematis pada basis data jurnal terkemuka seperti *Scopus*, *Web of Science*, *Google Scholar*, dan *Moraref* dengan memanfaatkan kata kunci strategis, antara lain: "qaulan sadidan", "post-truth", "disinformation", "hoax", dan "Islamic communication ethics". Untuk memastikan kualitas dan kemitakhiran referensi, pencarian difokuskan pada publikasi sepuluh tahun terakhir (2016-2026) dengan prioritas pada artikel jurnal terindeks Q1-Q2 Scopus atau Sinta 1-2. Seluruh literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi tematik, kredibilitas sumber, dan kontribusinya terhadap pemahaman atas masing-masing variabel penelitian, sehingga diperoleh korpus data yang representatif untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis yang saling berkelindan (Mustaqim, 2019). Pertama, reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari penelusuran literatur dengan memilih hanya informasi yang relevan dengan rumusan masalah. Kedua, penyajian data dilakukan dengan memetakan tema-tema besar yang muncul dari tafsir *Qaulan Sadidan* (seperti dimensi

kebenaran, kejujuran, dan orientasi perbaikan) serta karakteristik era *post-truth* (seperti dominasi emosi, mekanisme *hypertruth*, dan bias konfirmasi ke dalam matriks tematik untuk memudahkan analisis komparatif. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode komparatif-kontekstual, yaitu membandingkan penafsiran klasik dan kontemporer atas *Qaulan Sadidan*, kemudian mengontekstualisasikannya dengan temuan-temuan tentang mekanisme disinformasi di era *post-truth* untuk merumuskan reinterpretasi yang mampu berfungsi sebagai *counter-narrative* hoaks. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan model integratif yang tidak hanya sah secara teologis, tetapi juga relevan secara sosiologis dengan tantangan komunikasi kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna *Qaulan Sadidan* dalam Khazanah Tafsir

Konsep *Qaulan Sadidan* disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an sebanyak dua kali, yakni dalam QS. An-Nisa' [4]: 9 dan QS. Al-Ahzab [33]: 70-71. Ayat pertama turun dalam konteks peringatan kepada para wali atau pengampu anak yatim agar mereka berkata dengan benar dan adil ketika berwasiat, serta takut akan meninggalkan keturunan yang lemah di kemudian hari (Shihab, 2000). Sementara itu, ayat kedua dalam Surah Al-Ahzab merupakan seruan langsung kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar (*Qaulan Sadidan*), yang dijanjikan akan mendatangkan ampunan dosa dan pahala yang besar (Az-Zuhaili, 2009). Konteks mikro (*asbabun nuzul*) kedua ayat ini menunjukkan bahwa *Qaulan Sadidan* sejak awal dikaitkan dengan tanggung jawab sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta konsekuensi *ukhrawi* dari kualitas komunikasi yang dijalankan seorang Muslim.

Penafsiran klasik atas *Qaulan Sadidan*, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ath-Thabari (2001) dalam *Tafsir Jami'ul Bayan*, memaknai frasa ini sebagai "perkataan yang jujur" (*al-Qawl al-Shidq*). Ath-Thabari (2001) menegaskan bahwa perintah bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar dalam QS. Al-Ahzab: 70 mencakup seluruh ucapan dan perbuatan seorang mukmin, di mana yang dimaksud dengan perkataan benar adalah kejujuran. Ibnu Katsir (1999) juga sejalan dengan penafsiran ini, menekankan bahwa *Qaulan Sadidan* berarti perkataan yang lurus, benar, dan tidak bengkok, yang membawa konsekuensi perbaikan amal dan pengampunan dosa. Penafsiran klasik ini menempatkan *Qaulan Sadidan* dalam kerangka normatif-etis yang menekankan pada kejujuran sebagai fondasi utama komunikasi, terutama dalam konteks hubungan antargenerasi dan keadilan sosial.

Memasuki era kontemporer, para mufasir memperluas makna *Qaulan Sadidan* melampaui konteks wasiat dan hubungan keluarga, mencakup ranah komunikasi publik, pendidikan, dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Shihab (2000) dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa *Qaulan Sadidan* berarti perkataan yang benar, baik dari segi substansi maupun cara penyampaiannya, serta sesuai dengan sasaran dan kondisi lawan bicara. Az-Zuhaili (2009) dalam Tafsir Al-Munir menambahkan bahwa *Qaulan Sadidan* mencakup perkataan yang adil, jujur, lurus, dan tepat sasaran, yang menjadi indikator ketakwaan seorang hamba. Perluasan makna ini menjadikan *Qaulan Sadidan* sebagai prinsip komunikasi universal yang relevan tidak hanya dalam konteks privat, tetapi juga dalam wacana publik dan interaksi

sosial di era modern.

Keterkaitan *Qaulan Sadidan* dengan perintah takwa dalam QS. Al-Ahzab: 70-71 mengindikasikan adanya hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan horizontal (*hablum minannas*) yang tidak terpisahkan. Ayat ini secara eksplisit menghubungkan kualitas perkataan (*qaulan sadidan*) dengan ketakwaan kepada Allah, yang kemudian berimplikasi pada perbaikan amal dan pengampunan dosa (Az-Zuhaili, 2009). Struktur ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi yang benar dan jujur bukan semata-mata persoalan teknis atau etika sosial, melainkan bagian integral dari relasi spiritual seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan kata lain, kejujuran dalam berkomunikasi merupakan manifestasi ketakwaan sekaligus instrumen untuk mencapai ampunan dan keberuntungan besar (*fawzan 'adziman*) di sisi Allah.

Prinsip *tabayyun* (klarifikasi) dalam QS. Al-Hujurat: 6 menjadi fondasi operasional yang melengkapi konsep *Qaulan Sadidan*. Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan klarifikasi (*tabayyun*) ketika menerima informasi dari seorang fasik, agar tidak mencelakakan suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang pada akhirnya berujung pada penyesalan. Talalu, Hafid, dan Sakka (2022) menjelaskan bahwa *tabayyun* merupakan langkah preventif yang diajarkan Al-Qur'an untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, sehingga mencegah terjadinya fitnah dan kekacauan di tengah masyarakat. Prinsip ini menjadi mekanisme operasional yang menjadikan *Qaulan Sadidan* tidak hanya sebagai idealisme etis, tetapi juga sebagai praktik komunikasi yang dapat diimplementasikan dalam keseharian, terutama di era banjir informasi.

Menolak dan tidak menyebarkan hoaks merupakan konsekuensi logis dari komitmen terhadap *Qaulan Sadidan*, karena hoaks adalah antitesis mutlak dari kebenaran dan kejujuran. Talalu dkk. (2022) menegaskan bahwa hoaks bertentangan secara diametral dengan prinsip dan etika komunikasi yang terkandung dalam Al-Qur'an, yakni *Qaulan Sadidan* yang berarti benar dan tidak dusta. Lebih lanjut, mereka mengutip hadis riwayat Muslim (2005) yang menyatakan bahwa kejujuran membawa pada kebaikan dan surga, sementara kebohongan membawa pada keburukan dan neraka, yang menunjukkan bahwa persoalan hoaks tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi teologis yang serius. Dengan demikian, etika komunikasi Islam tidak sekadar menganjurkan kebaikan, tetapi secara aktif menolak kebohongan dalam segala bentuknya.

Berdasarkan penelusuran terhadap khazanah tafsir klasik dan kontemporer, dapat disimpulkan sementara bahwa tafsir *Qaulan Sadidan* secara konsisten menekankan pada dua aspek fundamental. Pertama, aspek konten atau substansi komunikasi, yakni kebenaran informasi yang disampaikan (*haq*). Kedua, aspek moral komunikator, yakni kejujuran niat dan integritas pribadi (*sidq*) yang melandasi setiap ucapan. Ependi dan Adenan (2025) menambahkan bahwa prinsip-prinsip ini mendorong kejelasan, verifikasi, empati, dan tanggung jawab dalam menavigasi arus informasi yang cepat dan konten yang bermuatan emosional. Kedua dimensi inilah yang akan menjadi fondasi bagi reinterpretasi *Qaulan Sadidan* sebagai *counter-narrative* hoaks di era *post-truth*.

### **Anatomi Hoaks di Era *Post-Truth***

Era *post-truth* didefinisikan oleh McIntyre (2018) sebagai kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan seruan pada emosi

dan keyakinan personal. Fenomena ini, yang menurut Oxford English Dictionary mengalami lonjakan penggunaan hingga 2000 persen pada 2016 (CBC, 2018), ditandai oleh "supremasi ideologis" di mana para aktor mencoba memaksa seseorang untuk mempercayai sesuatu terlepas dari bukti yang ada. McIntyre (2018) menjelaskan bahwa *post-truth* bukan sekadar kebohongan biasa, melainkan sebuah asersi bahwa fakta itu tidak relevan dan yang terpenting adalah bagaimana perasaan seseorang terhadap suatu isu. Dalam lanskap seperti ini, hoaks menjadi instrumen utama yang tidak hanya menyebarkan informasi palsu, tetapi juga secara sistematis membajak sisi emosional publik untuk kepentingan politik, ideologis, atau komersial.

Mekanisme mengapa narasi palsu lebih dipercaya daripada fakta dapat dijelaskan melalui konsep "hypertruth" yang dikembangkan Palomo (2025), serta gagasan tentang "filter realitas" (*reality filters*) dan "indeks kepercayaan" (*indices of trust*). Palomo (2025) menjelaskan bahwa hypertruth bekerja dengan mengeksploitasi keyakinan yang sudah tertanam sebelumnya dalam diri seseorang, sehingga informasi palsu yang selaras dengan keyakinan tersebut akan diterima sebagai kebenaran, terlepas dari validitas faktualnya. Tredinnick dan Laybats (2019) menambahkan bahwa setiap individu memiliki filter realitas yang dibentuk oleh pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sosialnya, yang menentukan informasi apa yang dianggap layak dipercaya. Sementara itu, indeks kepercayaan merujuk pada sumber-sumber atau figur-figur yang oleh seseorang dianggap kredibel, sehingga informasi yang berasal dari sumber tersebut—betapapun tidak masuk akal—akan lebih mudah diterima.

Karakteristik hoaks di era digital menunjukkan pola-pola yang khas dan semakin canggih. Pertama, viralitas menjadi tujuan utama, di mana hoaks dirancang untuk menyebar cepat dengan memanfaatkan judul sensasional (*clickbait*) dan konten yang mudah dibagikan (Media Indonesia, 2025). Kedua, desain emosional yang kuat, di mana hoaks sengaja dirancang untuk membangkitkan emosi seperti kemarahan, ketakutan, atau harapan palsu, sehingga audiens kehilangan kemampuan berpikir kritis (Jawa Pos, 2025). Ketiga, penguatan bias konfirmasi (*confirmation bias*), di mana hoaks dirancang untuk mengonfirmasi keyakinan yang sudah dimiliki audiens, sehingga mereka cenderung menerimanya tanpa verifikasi (Palomo, 2025). Keempat, hoaks semakin sulit dilacak karena menggunakan teknologi deepfake, akun-akun palsu, dan jaringan bot yang terorganisir, sebagaimana diingatkan oleh Palomo (2025) tentang tantangan baru di era kecerdasan buatan.

Dampak hoaks terhadap kehidupan sosial dan politik sangat destruktif dan multidimensi. Potts (2026) mengingatkan bahwa disinformasi telah menjadi ancaman eksistensial yang menggerus kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, media arus utama, dan bahkan sains. Di Indonesia, Talalu dkk. (2022) mendokumentasikan sejumlah kasus kekerasan yang dipicu oleh hoaks, seperti kepanikan massal di kawasan *Car Free Day* Solo akibat isu menara masjid akan ambruk, penganiayaan terhadap warga di Makassar oleh 13 remaja yang terprovokasi oleh berita bohong, serta pembakaran warung di Sorong akibat hoaks yang menyebar di masyarakat. Lebih luas lagi, survei Katadata Insight Center dan Kominfo tahun 2021 menunjukkan bahwa 11,9% masyarakat Indonesia masih menyebarkan berita bohong, sementara 14,3% menganggap hoaks sebagai masalah kecil, yang mengindikasikan rendahnya kesadaran akan bahaya disinformasi (Talalu dkk., 2022).

Media sosial memainkan peran sentral sebagai ruang resonansi (*echo chamber*) yang

mempercepat penyebaran disinformasi sekaligus mempersulit upaya koreksi. Konsepsi echo chamber merujuk pada lingkungan di mana seseorang hanya terpapar pada informasi atau pendapat yang mencerminkan dan memperkuat keyakinannya sendiri, sehingga sulit menerima sudut pandang yang berlawanan (Kompas, 2025). Kompas (2025) menjelaskan bahwa ketika seseorang mencari informasi dengan kata kunci tertentu, algoritma media sosial akan terus menyodorkan informasi serupa, menciptakan "gelembung filter" (*filter bubble*) yang mengisolasi pengguna dari keragaman informasi. Dalam kondisi ini, hoaks yang selaras dengan keyakinan seseorang akan terus diperkuat, sementara fakta yang bertentangan akan diabaikan atau bahkan dianggap sebagai bagian dari konspirasi, menciptakan siklus polarisasi yang sulit diputus.

Pendekatan korektif semata seperti *fact-checking* terbukti tidak memadai dalam mengatasi hoaks di era *post-truth*. McIntyre (2018) berargumen bahwa ketika seseorang sangat menginginkan untuk mempercayai sesuatu, terdapat kekuatan kognitif yang luar biasa—bias kognitif—yang akan membantunya untuk percaya, bahkan terhadap hal yang terbukti tidak benar. Artikel Jawa Pos (2025) mengidentifikasi sembilan kebiasaan yang membuat seseorang rentan terhadap hoaks, termasuk terlalu bergantung pada media sosial, mengabaikan sumber informasi, kurangnya kemampuan berpikir kritis, kecenderungan pada *confirmation bias*, dan terlalu terbawa emosi. Kebiasaan-kebiasaan ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap hoaks bukan semata-mata masalah kurangnya akses pada informasi benar, melainkan masalah psikologis dan struktural yang lebih dalam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mengoreksi informasi, tetapi juga membangun kesadaran epistemik dan etis audiens.

Berdasarkan pemetaan di atas, dapat disimpulkan sementara bahwa hoaks di era *post-truth* bukan sekadar persoalan informasi yang salah, melainkan masalah epistemik dan kepercayaan yang kompleks. Keberhasilan hoaks bertumpu pada kemampuannya menyentuh filter realitas dan indeks kepercayaan audiens, membajak emosi, serta memanfaatkan bias konfirmasi yang diperkuat oleh algoritma media sosial. Talalu dkk. (2022) menegaskan bahwa kegaduhan dan kekerasan yang terjadi akibat hoaks mempertegas bahwa masih banyak masyarakat yang "seenaknya bicara" tanpa memiliki kesadaran sosial dalam memilah informasi. Pemahaman ini menjadi penting untuk merumuskan *counter-narrative* yang tidak hanya menyediakan informasi benar, tetapi juga membangun fondasi epistemik yang kuat agar masyarakat memiliki ketahanan terhadap disinformasi.

### Titik Temu Awal: *Qaulan Sadidan* sebagai Antitesis Hoaks

Perbandingan langsung antara *Qaulan Sadidan* dan hoaks menunjukkan pertentangan yang fundamental pada level ontologis. *Qaulan Sadidan*, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, berakar pada komitmen terhadap kebenaran faktual (*haq*) yang bersumber dari realitas objektif dan nilai-nilai ilahiah. Sebaliknya, hoaks dibangun di atas kebohongan dan distorsi realitas yang sengaja direkayasa untuk mengecoh publik. Talalu dkk. (2022) menegaskan bahwa hoaks bertentangan dengan prinsip dan etika komunikasi Al-Qur'an karena ia merupakan antitesis dari kebenaran yang menjadi fondasi *Qaulan Sadidan*. Pada level ini, *Qaulan Sadidan* menawarkan orientasi epistemik yang berlawanan secara diametral dengan hoaks: yang satu mengajak pada realitas, sementara yang lain justru menjauhkan darinya.

Dari sisi orientasi dan dampak sosial, *Qaulan Sadidan* dan hoaks berada pada kutub yang berseberangan secara moral. *Qaulan Sadidan*, sebagaimana dianalisis Ependi dan Adenan (2025) dalam konteks komunikasi digital, mendorong empati, tanggung jawab, dan orientasi perbaikan (*ishlah*) dalam berinteraksi. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menghendaki kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Sebaliknya, hoaks berorientasi pada fitnah (kekacauan) dan perusakan tatanan sosial, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai kasus kekerasan yang dipicu informasi palsu di Indonesia (Talalu dkk., 2022). Talalu dkk. (2022) mendokumentasikan bagaimana hoaks menjadi "katalisator kegaduhan dan kekerasan" yang merusak kehidupan masyarakat. Dengan demikian, *Qaulan Sadidan* tidak hanya menolak kebohongan, tetapi juga secara aktif mengarahkan komunikasi pada tujuan-tujuan konstruktif.

Pada level operasional, *Qaulan Sadidan* menuntut verifikasi dan kejelasan (*tabayyun*), sementara hoaks justru mengeksploitasi ketidakjelasan dan ambiguitas. Prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat: 6 mewajibkan setiap Muslim untuk memverifikasi informasi yang diterima, terutama jika berasal dari sumber yang tidak terpercaya, sebelum menyebarkannya lebih lanjut (Talalu dkk., 2022). Ini adalah mekanisme filter internal yang diajarkan Al-Qur'an untuk mencegah penyebaran kebohongan. Sebaliknya, hoaks berkembang subur dalam kondisi ketidakjelasan, di mana audiens tidak memiliki waktu atau kemauan untuk memverifikasi kebenaran informasi. Artikel Jawa Pos (2025) mencatat bahwa mengabaikan pengecekan fakta adalah salah satu kebiasaan utama yang membuat seseorang mudah tertipu oleh hoaks. Dengan demikian, *Qaulan Sadidan* menawarkan disiplin epistemik yang menjadi benteng terhadap infiltrasi disinformasi.

Di sinilah letak potensi besar *Qaulan Sadidan* sebagai *counter-narrative* terhadap hoaks di era *post-truth*. Ketika hoaks bekerja dengan mengeksploitasi emosi dan bias konfirmasi, *Qaulan Sadidan* menawarkan fondasi etis-epistemik yang dapat membangun ketahanan individu terhadap disinformasi. Ketika hoaks menciptakan echo chamber yang mengisolasi seseorang dari kebenaran, *Qaulan Sadidan* mendorong keterbukaan pada verifikasi dan dialog. Dan ketika hoaks menghancurkan kohesi sosial melalui fitnah, *Qaulan Sadidan* mengarahkan komunikasi pada perbaikan dan kemaslahatan bersama. Reinterpretasi atas konsep ini, dengan mengintegrasikan ketiga pilar—*haq* (*validitas epistemik*), *sidq* (*integritas komunikator*), *danishlah* (orientasi perbaikan)—menjadi kerangka kerja yang potensial untuk merespons tantangan disinformasi kontemporer.

### **Reinterpretasi *Qaulan Sadidan*: Dari Etika Normatif ke Kerangka *Counter-Narrative***

Tafsir konvensional atas *Qaulan Sadidan*, meskipun telah memberikan fondasi etis yang kokoh, perlu direinterpretasi secara kontekstual agar mampu menjawab tantangan epistemik yang khas dari era *post-truth*. Penafsiran klasik yang memaknai *Qaulan Sadidan* sebagai "perkataan yang benar dan jujur" dalam konteks wasiat dan hubungan antargenerasi (Ath-Thabari, 2001; Ibnu Katsir, 1999), serta perluasan makna oleh mufasir kontemporer yang mencakup komunikasi publik (Az-Zuhaili, 2009; Shihab, 2000), tetap berada dalam kerangka normatif yang menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan. Namun, era *post-truth* menghadirkan problem yang berbeda: kebenaran objektif tidak hanya diabaikan, tetapi juga secara aktif didelegitimasi melalui mekanisme hypertruth yang menciptakan realitas alternatif berbasis emosi dan keyakinan (Palomo, 2025). Oleh karena itu, reinterpretasi *Qaulan Sadidan*

tidak cukup hanya dengan mengulang perintah untuk berkata benar, melainkan harus merumuskan kerangka kerja yang secara sistemik dapat membongkar mekanisme psikologis dan sosiologis yang membuat hoaks begitu efektif. Dengan kata lain, *Qaulan Sadidan* perlu direposisi dari sekadar etika normatif individual menjadi kerangka *counter-narrative* strategis yang menawarkan fondasi epistemik alternatif di tengah banjir disinformasi.

Pilar pertama dari reinterpretasi ini adalah dimensi epistemik yang dirangkum dalam konsepsi (kebenaran konten), di mana *Qaulan Sadidan* menuntut validitas informasi sebagai syarat mutlak komunikasi yang etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mufasir secara konsisten menekankan aspek kebenaran faktual sebagai inti dari *Qaulan Sadidan*, baik dalam konteks wasiat, pendidikan, maupun interaksi sosial (Ath-Thabari, 2001; Az-Zuhaili, 2009; Ibnu Katsir, 1999; Shihab, 2000). Prinsip ini menjadi antitesis langsung dari mekanisme *hypertruth* yang dijelaskan Palomo (2025), di mana seseorang cenderung mempercayai informasi yang selaras dengan keyakinan pralahirnya, terlepas dari validitas faktualnya. McIntyre (2018) juga menegaskan bahwa di era post-truth, yang terpenting bukanlah apakah suatu pernyataan sesuai dengan fakta, melainkan apakah pernyataan tersebut benar bagi audiens. Dengan menegaskan tuntutan validitas informasi, *Qaulan Sadidan* mengembalikan otoritas fakta objektif yang selama ini didelegitimasi. Ini berarti bahwa setiap komunikasi, terutama di ruang publik digital, harus melalui proses verifikasi yang memastikan kesesuaian antara klaim dan realitas, bukan sekadar resonansi emosional dengan audiens.

Pilar kedua adalah dimensi etis yang termanifestasi dalam konsepsi kejujuran dan integritas komunikator, yang menuntut adanya keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang diyakini dan dilakukan. Hasil penelitian mengungkap bahwa *Qaulan Sadidan* tidak hanya berbicara tentang kebenaran konten, tetapi juga tentang kejujuran niat dan integritas pribadi komunikator, sebagaimana ditegaskan dalam kaitannya dengan perintah takwa dalam QS. Al-Ahzab: 70-71 (Az-Zuhaili, 2009). Khasanah (2019), dalam kajiannya tentang etika komunikasi Al-Qur'an di media sosial, menekankan bahwa integritas komunikator mencakup tanggung jawab moral atas setiap informasi yang disebarkan, serta kesadaran bahwa setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Di era *post-truth*, di mana banyak aktor sengaja memproduksi dan menyebarkan disinformasi untuk kepentingan politik atau komersial (McIntyre, 2018; Palomo, 2025), tuntutan menjadi benteng moral yang krusial. Komunikator yang berintegritas tidak akan menjadi agen disinformasi yang sengaja memanipulasi emosi publik, karena ia memahami bahwa kejujuran bukan sekadar instrumen komunikasi, melainkan manifestasi ketakwaan yang memiliki konsekuensi *ukhrawi* (Muslim, 2005).

Pilar ketiga adalah dimensi teologi yang dirangkum dalam konsep islah (orientasi perbaikan), di mana *Qaulan Sadidan* bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Qaulan Sadidan* dikaitkan dengan janji ampunan dosa dan pahala yang besar, serta perbaikan amal (*yushlih lakum a'malakum*) dalam QS. Al-Ahzab: 71 (Az-Zuhaili, 2009) mengindikasikan bahwa komunikasi yang benar memiliki konsekuensi perbaikan tidak hanya pada level individual tetapi juga sosial. Ependi dan Adenan (2025), dalam studi mereka tentang relevansi *Qaulan Sadidan* bagi komunikasi digital Generasi Z, menekankan bahwa prinsip ini mendorong empati, tanggung jawab, dan kontribusi positif dalam interaksi daring. Orientasi ini menjadi pembeda fundamental dengan konten viral di media sosial yang sering kali dirancang untuk memicu konflik, kebencian, dan polarisasi (Kompas, 2025; Media Indonesia, 2025). Hoaks, sebagaimana didokumentasikan

dalam bagian hasil, berorientasi pada fitnah dan kekacauan yang merusak tatanan sosial (Talalu dkk., 2022). Dengan demikian, *Qaulan Sadidan* tidak hanya melarang kebohongan, tetapi juga secara aktif mengarahkan komunikasi pada tujuan-tujuan konstruktif yang membangun, bukan menghancurkan, kohesi sosial.

Ketiga pilar ini—*haq, sidq*, dan *ishlah*—bekerja secara sinergis untuk membangun ketahanan individu terhadap paparan hoaks di era *post-truth*. Pilar membangun kesadaran epistemik bahwa kebenaran informasi adalah soal fakta objektif yang dapat diverifikasi, bukan sekadar persepsi subjektif atau resonansi emosional. Seseorang yang terinternalisasi nilai hak akan terbiasa bertanya: "Apakah informasi ini benar secara faktual?" sebelum menyebarkannya, bukan "Apakah informasi ini sesuai dengan perasaan dan keyakinanmu?" Pilar membangun kesadaran moral bahwa sebagai komunikator, seseorang memiliki tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebarkan dan niat di balik penyebarannya. Ini menciptakan mekanisme kontrol internal yang mencegah seseorang menjadi bagian dari rantai disinformasi, meskipun informasi tersebut menguntungkan secara politis atau menguatkan identitas kelompoknya. Pilar *ishlah* membangun kesadaran teleologis bahwa komunikasi harus diorientasikan pada perbaikan, bukan perusakan, sehingga seseorang akan menimbang dampak sosial dari setiap informasi yang dibagikan.

Dalam praktik konkret di media sosial, sinergi ketiga pilar ini dapat diilustrasikan melalui respons seorang Muslim ketika menerima informasi yang belum terverifikasi. Misalnya, ketika menerima pesan berantai di WhatsApp yang berisi tuduhan terhadap kelompok tertentu, pilar hak akan mendorongnya untuk melakukan *tabayyun*—memeriksa kebenaran informasi tersebut melalui sumber-sumber terpercaya (Talalu dkk., 2022). Pilar *sidq* akan mengingatkannya bahwa menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi jika berpotensi memfitnah, adalah bentuk ketidakjujuran yang bertentangan dengan integritas sebagai Muslim (Khasanah, 2019). Pilar *ishlah* akan membantunya menyadari bahwa menyebarkan tuduhan tanpa verifikasi hanya akan memperkeruh suasana dan merusak harmoni sosial, sehingga ia memilih untuk tidak meneruskan pesan tersebut (Ependi & Adenan, 2025). Dalam skenario yang lebih proaktif, ia mungkin akan mengonfirmasi kebenaran informasi kepada pihak terkait atau bahkan memproduksi konten klarifikasi yang menenangkan publik. Inilah wujud konkret dari *Qaulan Sadidan* sebagai *counter-narrative* yang tidak hanya pasif menolak hoaks, tetapi juga aktif membangun ekosistem komunikasi yang sehat.

Lebih jauh lagi, sinergi ketiga pilar ini juga dapat diterapkan pada level kolektif, misalnya dalam praktik jurnalisme atau pengelolaan media komunitas. Seorang jurnalis Muslim yang berpegang pada prinsip *Qaulan Sadidan* tidak hanya dituntut untuk menyajikan berita yang akurat secara faktual (*haq*), tetapi juga untuk menjaga independensi dan keberpihakan pada kebenaran, bukan pada kepentingan pemilik modal atau afiliasi politik tertentu (*sidq*). Ia juga harus mempertimbangkan apakah pemberitaannya berkontribusi pada perbaikan sosial atau justru memperdalam polarisasi dan kebencian (*ishlah*). Dalam konteks ini, Ependi dan Adenan (2025) mencatat bahwa prinsip *Qaulan Sadidan* mendorong kejelasan, keakuratan, dan empati dalam komunikasi, yang sangat relevan untuk menavigasi arus informasi yang cepat dan konten yang bermuatan emosional. Dengan demikian, reinterpretasi *Qaulan Sadidan* tidak hanya menghasilkan etika individual, tetapi juga etika institusional yang dapat memandu praktik komunikasi profesional di era digital.

---

## Dialog dengan Literatur Global: Mengapa *Qaulan Sadidan* Relevan?

Prinsip *had* dalam *qaulan sadidan* dapat difungsikan sebagai "filter realitas" (*reality filter*) yang sehat, menggantikan filter berbasis prasangka (*zhann*) yang selama ini dieksploitasi oleh disinformasi. Konsepsi reality filters yang dikemukakan Tredinnick dan Laybats (2019) menjelaskan bahwa setiap individu memiliki serangkaian kriteria—yang dibentuk oleh pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sosial—untuk memutuskan informasi mana yang layak dipercaya. Di era *post-truth*, filter ini sering kali dibajak oleh disinformasi yang dirancang untuk menyentuh prasangka dan keyakinan yang sudah tertanam sebelumnya. Palomo (2025) menyebut mekanisme ini sebagai *hypertruth*, di mana informasi palsu yang selaras dengan keyakinan seseorang diterima sebagai kebenaran tanpa verifikasi. Prinsip dalam *Qaulan Sadidan* menawarkan koreksi radikal atas mekanisme ini dengan menegaskan bahwa kebenaran harus ditentukan oleh kesesuaian dengan fakta objektif, bukan oleh kesesuaian dengan prasangka subjektif. Ini sejalan dengan perintah *taba'yu* dalam QS. Al-Hujurat: 6 yang mewajibkan verifikasi informasi, terutama jika berasal dari sumber yang tidak terpercaya, sebelum mengambil keputusan atau menyebarkannya (Talalu dkk., 2022). Dengan demikian, *Qaulan Sadidan* membangun filter realitas yang berbasis pada komitmen terhadap kebenaran objektif yang secara langsung menetralkan efektivitas *hypertruth*.

Di era krisis kepercayaan pada media arus utama dan institusi tradisional, *Qaulan Sadidan* menawarkan fondasi baru untuk membangun "indeks kepercayaan" (*indices of trust*) berbasis integritas (*sidq*) dan verifikasi (*tabayyun*). Potts (2026) mengingatkan bahwa disinformasi telah menggerus kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, media, dan bahkan sains, menciptakan krisis kepercayaan yang sistemik. Dalam situasi ini, masyarakat cenderung beralih pada sumber-sumber alternatif yang mungkin tidak memiliki kredibilitas, hanya karena sumber tersebut selaras dengan identitas atau keyakinan mereka (Rodriguez, 2026). Khasanah (2019) menegaskan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an, komunikator yang amanah adalah mereka yang tidak hanya menyampaikan informasi benar, tetapi juga memiliki integritas moral yang membuatnya layak dipercaya. Prinsip dalam *Qaulan Sadidan* menekankan bahwa kepercayaan harus dibangun di atas kejujuran dan konsistensi antara ucapan dan tindakan, bukan sekadar popularitas atau afiliasi kelompok. Ini menawarkan jalan keluar dari krisis kepercayaan dengan mengembalikan fondasi trust pada kualitas moral komunikator, yang dapat diverifikasi melalui rekam jejak dan komitmennya pada kebenaran.

Menarik untuk membandingkan *Qaulan Sadidan* dengan tradisi etika keutamaan (*virtue ethics*) dalam filsafat Barat, yang juga menekankan pentingnya karakter moral pelaku, bukan sekadar kepatuhan pada aturan. Ependi dan Adenan (2025), dalam studi mereka, menunjukkan bahwa *Qaulan Sadidan* mendorong pengembangan karakter komunikator yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Ini sejalan dengan *virtue ethics* ala Aristoteles yang menekankan bahwa tindakan etis mengalir dari karakter yang berbudi, bukan sekadar dari kewajiban atau konsekuensi. Dalam konteks komunikasi, pendekatan *virtue ethics* mengkritik etika komunikasi prosedural yang terlalu fokus pada aturan teknis seperti format penulisan atau mekanisme koreksi, tetapi mengabaikan pembentukan karakter komunikator yang berbudi. *Qaulan Sadidan*, dengan penekanannya pada kejujuran sebagai manifestasi ketakwaan, menawarkan model etika komunikasi *virtuoso* yang mengintegrasikan pembentukan karakter moral dengan praktik komunikasi sehari-hari. Ini menjadi relevan

karena di era *post-truth*, aturan prosedural semata tidak akan efektif jika tidak didukung oleh integritas personal komunikator (McIntyre, 2018).

Reinterpretasi *Qaulan Sadidan* juga menemukan relevansinya dalam menjawab tantangan baru yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan (AI) dan teknologi deepfake. Palomo (2025) mengingatkan bahwa di era AI, disinformasi menjadi semakin canggih dan sulit dideteksi karena teknologi *deepfake* memungkinkan manipulasi konten audiovisual yang tampak autentik. Dalam situasi ini, prinsip *tabayyun* (verifikasi) yang merupakan fondasi operasional *Qaulan Sadidan* menjadi semakin krusial. Jika sebelumnya *tabayyun* mungkin cukup dilakukan dengan mengecek sumber berita atau mengonfirmasi kepada pihak terkait, di era AI, *tabayyun* menuntut literasi digital yang lebih tinggi, termasuk kemampuan mendeteksi konten yang dimanipulasi secara teknologi. Talalu dkk. (2022) menegaskan bahwa etika komunikasi Islam tidak hanya relevan untuk konteks tradisional, tetapi juga harus terus diaktualisasikan untuk merespons perkembangan teknologi. Prinsip bahwa yang menuntut validitas informasi juga berarti bahwa seorang Muslim harus melek teknologi agar mampu membedakan konten asli dan konten rekayasa AI. Dengan demikian, *Qaulan Sadidan* memberikan landasan teologis bagi pengembangan literasi digital kritis yang sangat dibutuhkan di era *deepfake*.

Dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, penerapan prinsip *Qaulan Sadidan* menjadi instrumen penting untuk merawat harmoni sosial di tengah keberagaman. Talalu dkk. (2022) mendokumentasikan bagaimana hoaks telah memicu berbagai konflik horizontal di Indonesia, termasuk kekerasan fisik yang merenggut korban jiwa. Kondisi ini diperparah oleh polarisasi politik berbasis identitas yang memanfaatkan media sosial sebagai ruang resonansi kebencian (Kompas, 2025). Prinsipilah dalam *Qaulan Sadidan* yang mengarahkan komunikasi pada perbaikan sosial menawarkan antitesis terhadap narasi-narasi pemecah belah. Ependi dan Adenan (2025) mencatat bahwa *Qaulan Sadidan* mendorong empati dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, yang sangat relevan untuk membangun dialog lintas kelompok di masyarakat plural. Lebih dari itu, prinsip menghormati menuntut kejujuran dalam menyampaikan informasi tentang kelompok lain, tanpa dibumbui prasangka atau kebencian. Dengan demikian, *Qaulan Sadidan* dapat menjadi fondasi etis bagi praktik komunikasi antarbudaya dan antaragama yang konstruktif di Indonesia.

Penerapan *Qaulan Sadidan* juga dapat memperkuat gerakan literasi digital yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan kognitif. Program-program literasi digital yang ada umumnya mengajarkan keterampilan memverifikasi informasi, mengenali hoaks, dan menggunakan internet secara aman (Jawa Pos, 2025). Meskipun penting, pendekatan ini sering kali mengabaikan dimensi afektif dan moral yang justru menjadi sasaran utama disinformasi di era *post-truth*. McIntyre (2018) menjelaskan bahwa di era *post-truth*, orang tidak hanya kekurangan informasi, tetapi secara aktif menolak informasi yang tidak sesuai dengan identitas atau keyakinan mereka. *Qaulan Sadidan*, dengan tiga pilar *haq-sidq-ishlah*, menawarkan fondasi nilai yang dapat menggerakkan seseorang untuk tidak hanya mampu, tetapi juga mau, melakukan verifikasi dan menolak hoaks. Ketika verifikasi informasi dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan manifestasi ketakwaan (Khasanah, 2019), motivasi untuk melakukannya menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap godaan untuk mengambil jalan pintas emosional. Ini adalah kontribusi signifikan yang dapat diberikan oleh perspektif Islam dalam memperkaya gerakan literasi digital global.

Dialog dengan literatur tentang etika komunikasi kontemporer juga menunjukkan bahwa *Qaulan Sadidan* sejalan dengan kritik terhadap "etika prosedural" yang dominan dalam diskursus komunikasi modern. Etika prosedural, yang banyak diadopsi dalam kode etik jurnalistik dan pedoman media sosial, cenderung fokus pada kepatuhan terhadap aturan dan mekanisme koreksi. Namun, di era *post-truth*, kepatuhan prosedural terbukti tidak cukup karena masalahnya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada ketiadaan komitmen moral terhadap kebenaran (McIntyre, 2018). Khasanah (2019) menekankan bahwa etika komunikasi Al-Qur'an tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga membentuk kesadaran bahwa setiap ucapan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. *Qaulan Sadidan*, dengan menghubungkan kualitas komunikasi dengan ketakwaan dan konsekuensi ukhrawi, menawarkan fondasi moral yang lebih dalam daripada sekadar kepatuhan pada aturan prosedural. Ini memberikan resonansi yang kuat dengan kritik kontemporer terhadap etika prosedural yang dangkal dan mengusulkan kembalinya pada etika kebajikan yang menekankan pembentukan karakter.

### Kontribusi, Implikasi, dan Agenda ke Depan

Kontribusi teoretis utama dari penelitian ini adalah menawarkan model etika komunikasi Islam integratif yang dirangkum dalam tiga pilar: *Haq* (validitas epistemik), *Sidq* (integritas komunikator), dan *Ishlah* (orientasi perbaikan). Model ini melampaui pendekatan normatif-tekstualis yang selama ini dominan dalam kajian etika komunikasi Islam, yang cenderung mengulang perintah-perintah normatif tanpa menghubungkannya secara sistemik dengan problem kontemporer. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi—epistemik, etis, dan teleologis—model ini menawarkan kerangka yang lebih komprehensif untuk menganalisis dan merespons tantangan komunikasi di era digital. *Haq* memastikan bahwa komunikasi berakar pada kebenaran objektif, menepis relativisme *post-truth* yang mendelegitimasi fakta (McIntyre, 2018; Palomo, 2025). *Sidq* memastikan bahwa komunikator memiliki integritas yang membuatnya layak dipercaya, menjawab krisis kepercayaan yang melanda institusi modern (Potts, 2026; Rodriguez, 2026). *Ishlah* memastikan bahwa komunikasi diorientasikan pada perbaikan sosial, menjadi antitesis dari konten viral yang sering kali destruktif (Kompas, 2025; Media Indonesia, 2025). Integrasi ketiganya memperkaya diskursus "*Islamic communication ethics*" di tingkat global dengan menyediakan model yang tidak hanya etis secara normatif, tetapi juga strategis secara operasional.

Model *Haq-Sidq-Ishlah* juga memperkaya diskursus akademik tentang *counter-narrative* dengan menawarkan pendekatan berbasis nilai yang berakar pada tradisi keislaman. Selama ini, studi tentang *counter-narrative* lebih banyak dikembangkan dalam konteks deradikalisasi atau kontra-terorisme, dengan fokus pada membongkar narasi ekstremis melalui argumen tandingan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa *counter-narrative* dapat diperluas untuk merespons disinformasi secara umum, dengan membangun fondasi epistemik dan etis yang membuat individu kebal terhadap hoaks. Palomo (2025) menekankan pentingnya pendekatan aprioristik dalam memahami disinformasi, yaitu dengan membangun kesadaran tentang bagaimana pengetahuan terbentuk dan bagaimana ia bisa diselewengkan. Model *Haq-Sidq-Ishlah*, dengan penekanannya pada verifikasi (*haq*), integritas (*sidq*), dan orientasi kebaikan (*ishlah*), dapat dilihat sebagai implementasi praktis dari pendekatan aprioristik tersebut dalam

kerangka nilai-nilai Islam. Ini membuka peluang bagi pengembangan teori *counter-narrative* yang lebih kaya secara kultural dan religius.

Pada level praktis, model ini memiliki implikasi signifikan bagi pengembangan program literasi digital, terutama untuk segmen masyarakat Muslim. Ependi dan Adenan (2025) telah menunjukkan relevansi *Qaulan Sadidan* untuk komunikasi digital Generasi Z, yang merupakan kelompok paling aktif di media sosial sekaligus paling rentan terhadap paparan hoaks (Jawa Pos, 2025). Materi literasi digital berbasis *Qaulan Sadidan* dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam keterampilan teknis memverifikasi informasi. Misalnya, modul literasi digital tidak hanya mengajarkan cara menggunakan mesin pencari atau mengecek fakta di situs resmi, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa *tabayyun* adalah kewajiban agama, dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip *sidq* (Khasanah, 2019; Talalu dkk., 2022). Pendekatan berbasis nilai seperti ini berpotensi lebih efektif karena menyentuh motivasi terdalam individu, bukan sekadar keterampilan kognitif. Talalu dkk. (2022) menegaskan bahwa etika komunikasi Islam harus diinternalisasikan, bukan hanya diajarkan sebagai pengetahuan, agar mampu membentuk perilaku nyata dalam keseharian.

Implikasi praktis lainnya adalah bagi perumusan regulasi konten digital, di mana model *Haq-Sidq-Ishlah* dapat memberikan perspektif etis-religius yang selama ini kurang terwakili. Regulasi konten digital cenderung menggunakan pendekatan legal-formal yang fokus pada sanksi dan mekanisme penghapusan konten, yang sering kali reaktif dan tidak menyentuh akar masalah. Pendekatan *Qaulan Sadidan* menawarkan perspektif yang lebih preventif dan humanis, dengan menekankan pada pembentukan kesadaran dan tanggung jawab moral para pelaku komunikasi (Khasanah, 2019). Regulator dapat mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam program edukasi publik, kampanye literasi digital, bahkan dalam penyusunan kode etik bagi platform media sosial yang beroperasi di Indonesia. Palomo (2025) mengingatkan bahwa regulasi semata tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan transformasi kesadaran masyarakat tentang apa yang layak dipercaya dan mengapa. *Qaulan Sadidan*, dengan fondasi teologisnya yang kuat, dapat menjadi bagian dari transformasi kesadaran tersebut.

Bagi dunia jurnalisme, model ini menawarkan penguatan moralitas jurnalistik di tengah tekanan viralitas dan komersialisasi berita. Kode etik jurnalistik selama ini sudah menekankan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan, yang sejalan dengan pilar *haq* dalam *Qaulan Sadidan*. Namun, tekanan industri media yang mengutamakan klik dan *traffic* sering kali mengorbankan prinsip-prinsip ini. Berita sensasional yang belum terverifikasi, judul *click bait* yang menyesatkan, serta framing yang provokatif menjadi praktik umum yang justru memperkuat ekosistem disinformasi (Media Indonesia, 2025). Pilar *sidq* dalam *Qaulan Sadidan* mengingatkan bahwa jurnalis tidak boleh mengorbankan integritas demi kepentingan komersial atau tekanan politik. Pilar *ishlah* mengingatkan bahwa pemberitaan harus diorientasikan pada perbaikan sosial, bukan sekadar mengejar rating atau memperdalam polarisasi. Dengan menginternalisasi *Qaulan Sadidan*, jurnalis Muslim dapat menjadi teladan dalam praktik jurnalisme yang tidak hanya akurat, tetapi juga bermartabat dan konstruktif.

Penelitian ini, meskipun memberikan kontribusi konseptual yang signifikan, memiliki sejumlah limitasi yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini masih berada pada tataran konseptual-filosofis, mengandalkan analisis teks tafsir dan literatur tentang *post-truth* tanpa disertai data empiris tentang efektivitas model yang diusulkan. Kedua, sumber data primer

terbatas pada dua ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebut *Qaulan Sadidan*, meskipun prinsip-prinsip terkait seperti *tabayyun*, *sidq*, dan *ishlah* dapat ditemukan di banyak ayat lain. Ketiga, penelitian ini belum menguji secara spesifik bagaimana model *haq-sidq-ishlah* dapat dioperasionalkan dalam konteks sosial dan budaya yang beragam di Indonesia, mengingat pemahaman dan praktik keislaman sangat bervariasi di berbagai komunitas. Talalu dkk. (2022) mencatat bahwa respons terhadap hoaks dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk tingkat pendidikan, afiliasi politik, dan lingkungan sosial, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam penelitian ini. Limitasi-limitasi ini bukan berarti mengurangi nilai penelitian, melainkan menunjukkan perlunya studi lanjutan yang lebih komprehensif.

Ke depan, agenda riset yang dapat dikembangkan dari penelitian ini sangat luas dan multidisipliner. Pertama, diperlukan studi kuantitatif untuk menguji pengaruh pemahaman dan internalisasi nilai-nilai *Qaulan Sadidan* terhadap perilaku digital, khususnya kecenderungan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Penelitian semacam ini dapat menggunakan skala psikometrik yang mengukur tingkat komitmen responden pada prinsip *haq*, *sidq*, dan *ishlah*, kemudian mengorelasikannya dengan frekuensi berbagi hoaks atau partisipasi dalam diskusi daring yang konstruktif. Kedua, diperlukan riset pengembangan (*research and development*) untuk merancang kurikulum literasi digital berbasis *Qaulan Sadidan* yang terintegrasi dengan pendidikan formal maupun nonformal, seperti di pesantren, majelis taklim, atau sekolah umum. Ependi dan Adenan (2025) telah memulai langkah ini dengan merekomendasikan integrasi nilai-nilai *Qaulan Sadidan* dalam pendidikan komunikasi digital untuk Generasi Z. Ketiga, diperlukan analisis konten media sosial dengan menggunakan kerangka *haq-sidq-ishlah* sebagai alat analisis untuk memetakan kualitas wacana publik di ruang digital. Penelitian semacam ini dapat mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip etika komunikasi Islam tercermin dalam praktik komunikasi netizen Muslim, sekaligus mengidentifikasi area-area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut.

Selain itu, penelitian lintas-disiplin yang melibatkan ilmu komunikasi, psikologi kognitif, studi Islam, dan ilmu komputer juga sangat diperlukan untuk merespons tantangan disinformasi yang semakin kompleks. Palomo (2025) menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan melawan disinformasi, mengingat problem ini menyentuh aspek psikologis, sosiologis, teknologis, dan filosofis sekaligus. Kolaborasi dengan ahli AI dan data *science*, misalnya, dapat menghasilkan alat deteksi hoaks yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga sensitif secara kultural dan religius. Kolaborasi dengan psikolog kognitif dapat membantu merancang intervensi yang efektif untuk mengatasi bias konfirmasi dan bias emosional yang dieksploitasi oleh disinformasi (McIntyre, 2018). Kolaborasi dengan sosiolog dapat memetakan dinamika polarisasi sosial yang diperparah oleh hoaks dan merancang strategi membangun dialog lintas kelompok (Kompas, 2025). Dengan demikian, agenda riset ke depan tidak hanya memperdalam pemahaman tentang *Qaulan Sadidan*, tetapi juga mengembangkan solusi praktis yang terintegrasi untuk mengatasi krisis post-truth secara lebih komprehensif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini telah mendemonstrasikan bahwa konsep *Qaulan Sadidan* dalam Al-Qur'an, melalui reinterpretasi kontekstual, melahirkan tiga pilar utama yang secara sistemik dapat

berfungsi sebagai *counter-narrative* terhadap hoaks di era *post-truth*. Pilar pertama, *haq* (validitas epistemik), menuntut verifikasi informasi dan mengembalikan otoritas fakta objektif yang selama ini didelegitimasi oleh mekanisme *hypertruth* yang mengandalkan emosi dan keyakinan subjektif. Pilar kedua, *sidq* (integritas komunikator), menekankan kejujuran niat dan tanggung jawab moral sebagai fondasi kepercayaan, menjawab krisis kredibilitas yang melanda institusi komunikasi modern. Pilar ketiga, *islah* (orientasi perbaikan), mengarahkan komunikasi pada tujuan-tujuan konstruktif yang membangun kohesi sosial, menjadi antitesis dari konten viral yang sering kali dirancang untuk memicu konflik dan polarisasi. Ketiga pilar ini bekerja secara sinergis, tidak hanya melarang kebohongan, tetapi juga membangun kesadaran epistemik dan etis dari komunikator yang membuatnya memiliki ketahanan terhadap disinformasi.

Implikasi strategis dari temuan ini adalah perlunya mengintegrasikan nilai-nilai *Qaulan Sadidan* ke dalam program literasi digital nasional, terutama untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap banjir disinformasi. Pendekatan literasi digital yang selama ini dominan mengajarkan keterampilan teknis memverifikasi informasi terbukti tidak memadai karena tidak menyentuh dimensi afektif dan moral yang menjadi sasaran utama hoaks di era *post-truth*. Model *Haq-Sidq-Ishlah* menawarkan solusi yang lebih substansial karena menyentuh aspek nilai dan keyakinan, memposisikan verifikasi informasi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan manifestasi ketakwaan. Bagi regulator, pendekatan ini memberikan perspektif etis-religius dalam merumuskan kebijakan konten digital yang lebih manusiawi dan preventif. Bagi dunia jurnalisme, model ini memperkuat moralitas jurnalistik di tengah tekanan viralitas, mengingatkan bahwa akurasi dan integritas tidak boleh dikorbankan demi kepentingan komersial. Bagi pendidik, kerangka ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama dan komunikasi untuk membentuk generasi yang tidak hanya melek digital, tetapi juga memiliki fondasi etis yang kokoh.

Penelitian konseptual ini, meskipun memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam memperkaya diskursus etika komunikasi Islam kontemporer, memiliki limitasi yang perlu diakui dan menjadi pintu masuk bagi riset-riset lanjutan. Sifatnya yang kepastakaan dan konseptual berarti model yang dihasilkan belum diuji secara empiris untuk mengukur efektivitasnya dalam konteks nyata. Oleh karena itu, studi selanjutnya disarankan untuk menguji secara praktis efektivitas kerangka *Qaulan Sadidan* dalam intervensi literasi digital, terutama di kalangan generasi muda Muslim yang merupakan kelompok paling aktif di media sosial sekaligus paling rentan terhadap paparan hoaks. Diperlukan juga pengembangan instrumen dan indikator-indikator yang valid dan reliabel untuk mengukur "komunikasi yang *sadid*" di ruang digital, sehingga konsep ini dapat dioperasionalkan dalam penelitian kuantitatif. Selain itu, kolaborasi lintas-disiplin dengan psikologi kognitif, ilmu komunikasi, dan teknologi informasi sangat diperlukan untuk merancang intervensi yang komprehensif dalam merespons tantangan disinformasi yang semakin kompleks di era kecerdasan buatan.

## REFERENSI

Abdullah, A. (2024). Persepsi dan respons mahasiswa terhadap berita hoax dan ujaran kebencian: Tinjauan berdasarkan Qaulan Sadidan dan Qaulan Balighan. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 7(1), 45-68.  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/21558>

- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2001). *Tafsir Ath-Thabari: Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an*(Jilid 20). Dar Hijr.
- Az-Zuhaili, W. (2009). *Al-Tafsir al-munir fi al-'aqidah wa al-sya'rah wa al-manhaj*(Jilid 11). Dār al-Fikr.
- CBC. (2018, April 29). *How 'post-truth' entered the political mainstream*. CBC Radio. <https://www.cbc.ca/radio/sunday/the-sunday-edition-april-29-2018-1.4638038/how-post-truth-entered-the-political-mainstream-1.4638127>
- Chan, M., Vaccari, C., & Yamamoto, M. (2025). Cognitive drivers of misinformation belief and sharing on social media: A cross-national comparison. *Mass Communication and Society*, 1-19. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/15205436.2025.2577294>
- Ependi, M., & Adenan, A. (2025). Qaulan Sadidan in QS. An-Nisa verse 9 and its ethical relevance for Generation Z's digital communication. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 4(2), 259-274. <https://doi.org/10.69548/sinthop.v4.i2.66.259-270>
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*(2nd ed.). Routledge.
- Fauzi, Nurhasan, Zahrani (2025). Etika Komunikasi Islam Dalam Era Post-Truth. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/misykah/issue/view/213>
- Ibnu Katsir, I. A. A.-F. I. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*(Jilid 6). Dar Thayyibah.
- Jawa Pos. (2025, Oktober). *9 kebiasaan ini bikin kita gampang kena hoax, kamu juga sering melakukannya?*Jawa Pos.
- Khasanah, F. (2019). The Qur'anic communication ethics in social media. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 14(1), 151-167. <https://doi.org/10.21274/epis.2019.14.1.151-167>
- Kompas. (2025, Maret). *Gelembung filter dan polarisasi: Bagaimana media sosial membentuk realitas*. Kompas.
- McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. MIT Press.
- Media Indonesia. (2025, September 22). *Viral jadi palu hukum hanya gema*. Media Indonesia. [https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/3462-viral-jadi-palu-hukum-hanya-gema](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/3462-viral-jadi-palu-hukum-hanya-gema)
- Muslim bin Hajjaj. (2005). *Shahih Muslim*(Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab, Bab Qurb al-Jannah bi al-Shidq). Dar Thayyibah.
- Mustaqim, A. (2019). *Metode penelitian Al-Qur'an dan tafsir*. Idea Press.
- Palomo, M. (2025). Hypertruth and the foundations of disinformation: An aprioristic approach. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 1-18. <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2527522>
- Potts, T. (2026, January 19). *How to rebuild trust in a post-truth world*. Evidence for Democracy. <https://evidencefordemocracy.ca/how-to-rebuild-trust-in-a-post-truth-world/>
- Rodriguez, D. (2026, January 1). *The battle for truth: Navigating science, policy, and disinformation in a divided world*. Glasp. <https://glasp.co/hatch/diogo/p/PHbEymLn3hVhGvdgffW9>
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*(Vol. 2). Lentera Hati.
- Talalu, T. R., Hafid, E., & Sakka, A. R. (2022). Hoaks dan etika berkomunikasi:

Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir*, 1 (2), 85-99. <https://doi.org/10.58194/alaqwam.v1i2.550>

Tredinnick, L., & Laybats, C. (2019). The nature of truth and the challenges of misinformation. *Business Information Review*, 36(4), 158-163. <https://doi.org/10.1177/0266382119892591>